

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sendiri tentu menjadi salah satu tujuan utama yang harus dicapai oleh semua negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia yang masih menjadi negara berkembang. Pembangunan ekonomi ini dilakukan untuk memaksimalkan kondisi perekonomian, yang nantinya dapat menjadi mutu hidup dan kesejahteraan rakyat. Namun, masih banyak kendala yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Yaitu salah satunya adalah pengentasan kemiskinan yang merupakan suatu kondisi dimana keluarga ataupun individu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup seperti sandang, pendidikan, pangan, tempat tinggal ataupun kesehatan.²

Salah satu aspek dari menghambatnya pelaksanaan pembangunan ekonomi sendiri ialah masalah kemiskinan. Maka dari itu, efektivitas dalam meminimalkan jumlah penduduk miskin adalah pemikiran yang mendasar dalam memilih suatu instrumen pembangunan. Hal ini yang nantinya, akan menjadi implikasi bahwa salah satu jalan utama dalam memilih kawasan sektor pembangunan nasional adalah ketepatan dalam meminimalisir jumlah penduduk miskin.³ Menurut Todaro dalam Umah mengemukakan bahwa

² Ali Mauludi AC, Fadllan, and Fitri Nur Rahmawati, "Pengaruh Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2023): 67–88.

³ Amelia Sestu Rahajeng, Sri Muljaningsih, and Kiky Asmara, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 5 (2021): 774–784.

kemiskinan yang terus meluas serta angka yang tinggi menjadi inti semua permasalahan pada pembangunan.⁴

Kemiskinan sendiri menjadi masalah sosial yang bersifat jangka panjang sehingga sulit untuk diatasi hingga saat ini. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di sebagian besar negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Masalah kemiskinan muncul dikarenakan adanya sebagian orang yang masih belum mampu untuk mengatur kehidupannya hingga taraf yang manusiawi.⁵

Kemiskinan dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal.⁶

⁴ Siti Khoirul Umah, “Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur (2000-2019),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (2021): 40.

⁵ Dyah Puspitaning Ayu and Prayudi Setiawan Prabowo, “Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018,” *Independent: Journal of Economics* 1, no. 1 (2021): 170–185.

⁶ Elda Wahyu Azizah et al., “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2 (2018): 167–180.

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

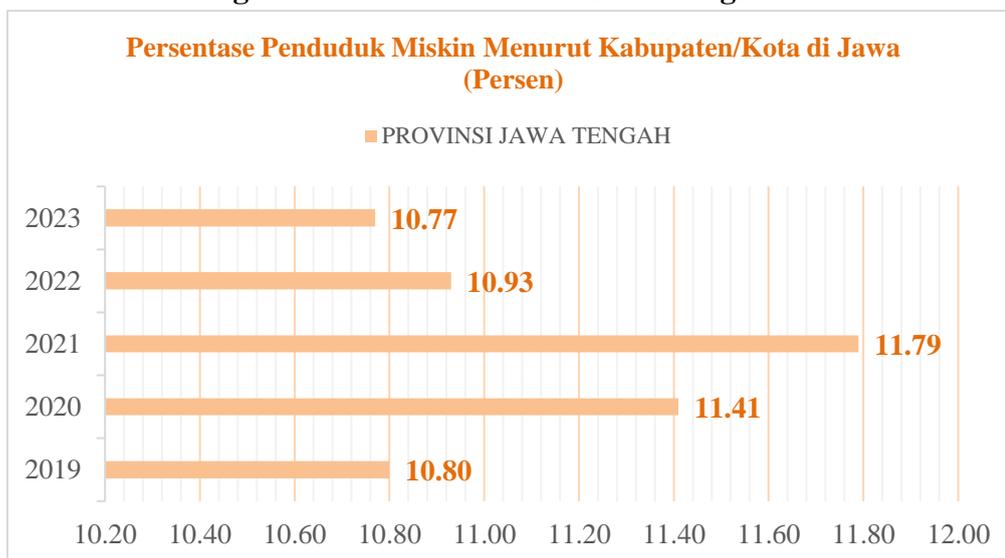
Kemiskinan nasional di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sempat meningkat akibat pandemi Covid-19 pada 2020 hingga 2021, angka kemiskinan secara bertahap kembali menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,03 persen, setara dengan 25,22 juta penduduk miskin, dan kemudian turun lagi pada September 2024 menjadi 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta orang, ini merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ini terjadi di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, meskipun secara absolut jumlah penduduk miskin sedikit bertambah sekitar 80 ribu jiwa sejak 2019 karena pertumbuhan populasi nasional.⁷

Masalah kemiskinan dialami oleh salah satu provinsi di Pulau Jawa yang tidak terlepas dari masalah kemiskinan yaitu Provinsi Jawa Tengah

⁷ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Di Indonesia Per Maret 2023*, 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html#:~:text=Jumlah penduduk miskin pada Maret,yang sebesar 7%2C53 persen.>

dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,77 persen pada tahun 2023, hal ini mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dari tahun 2022 yang berada pada angka 10,93 persen. Meski mengalami penurunan angka, kemiskinan di Jawa Tengah tetap berada di atas angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,03 persen. Kemiskinan ini merupakan akumulasi dari kemiskinan di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa tengah yakni sebanyak 35 kabupaten/kota.

Gambar 1. 2 Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Pada gambar 1.2 bisa dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif. Persentase tingkat tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 11,79 persen. Meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2021 disebabkan oleh kritis pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan, namun Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi paling miskin kedua di Pulau Jawa menurut BPS pada Maret 2024. Hal inilah yang harus diperhatikan dan peran pemerintah juga diperlukan

untuk mengentaskan kemiskinan agar pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan.

Penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah adalah masalah mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tersebut dapat mengakibatkan kegagalan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.⁸ Jumlah penduduk sendiri sudah beberapa kali menjadi persoalan, yang dimana jika peningkatan jumlah penduduk yang tidak bisa diatasi justru akan memungkinkan terjadinya angka kemiskinan yang melonjak. Jumlah penduduk sendiri dapat berubah dengan bertambah atau berkurangnya faktor-faktor lain seperti kelahiran, kemiskinan, dan juga migrasi. Selain itu, jumlah pengangguran juga merupakan faktor yang juga mempengaruhi kemiskinan, pengangguran bisa dikatakan orang tergolong tenaga kerja dan masih berusaha memperoleh pekerjaan, namun belum mendapatkan yang diimpikan.⁹

Menurut Nelson dan Leibstein, terdapat pengaruh langsung antara penambahan jumlah penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, Pertumbuhan penduduk yang pesat utamanya di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka Panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Bertambahnya

⁸ Hilmi et al., "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli," *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 4, no. 1 (2022): 19–26.

⁹ Azka Rizkina et al., "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kasus 34 Provinsi)," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 11, no. 3 (2025): 1964–1971, <https://journal.lembagakita.org>.

jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan.¹⁰

Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan gambar 1.3, diketahui bahwa persentase penduduk mengalami fluktuatif. Grafik jumlah penduduk di Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah penduduk tercatat sekitar 34.718.204 juta jiwa, kemudian terus mengalami kenaikan hingga mencapai 37.540.962 juta jiwa pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan populasi yang stabil di wilayah tersebut, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian, serta migrasi masuk dari daerah lain. Tren ini menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur dan layanan publik yang memadai untuk mendukung peningkatan jumlah penduduk di Jawa Tengah.

¹⁰ Juardi, Muh. Arief Ariyanto Ahmad, and Baso Iwang, "Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan," *Bulletin of Economic Studies (BEST)* 3, no. 1 (2023): 14–24, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index>.

Selain jumlah penduduk, faktor yang menjadi masalah utama dari kemiskinan sendiri ialah pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.¹¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk menentukan apakah suatu perekonomian mengalami kemajuan atau tidak. Jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya, maka perekonomian dikatakan tumbuh. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat selama periode waktu tertentu. Karena kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, proses ini akan menghasilkan aliran balas jasa bagi faktor-faktor produksi masyarakat. Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat sebagai pemilik komponen produksi juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) untuk produk dan jasa akhir yang dihasilkan oleh

¹¹ Endar Wati and Arief Sadjiarto, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan," *Jurnal Ecodunamika Pendidikan Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana* 2, no. 1 (2019), <https://ejournal.uksw.edu>.

perekonomian selama periode waktu tertentu.¹²

Gambar 1. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan gambar 1.4, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Pada tahun 2019, PDRB mengalami peningkatan moderat, tetapi tahun 2020 mengalami perlambatan signifikan akibat dampak pandemi COVID-19, yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Namun, sejak tahun 2021, terjadi pemulihan ekonomi yang cukup kuat, didorong oleh peningkatan sektor industri, perdagangan, dan jasa. Tren pemulihan ini berlanjut hingga tahun 2023, dengan pertumbuhan PDRB yang kembali ke jalur positif, mencerminkan adaptasi dan kebangkitan ekonomi Jawa Tengah pasca-pandemi.

Peran pemerintah sendiri sudah sangat berpartisipasi dimana

¹² Suryani et al., "Pengaruh IPM Dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Ekonomi Tingkat Rendah (Miskin) Di Sumatera Utara," *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 01–12.

pemerintah pusat maupun daerah sudah melakukan upaya dengan berbagai kebijakan dan program yang tentang pengentasan kemiskinan, namun masih belum terlalu jauh dari faktor-faktor masalah utama lainnya. Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini sudah menjadi tanggung jawab terutama bagi pemerintah untuk mendukung proses peningkatan mutu hidup suatu masyarakat untuk dapat keluar dari zona kemiskinan ini.¹³ Menurut Nuriyah dkk, dalam Herlambang dan Rachmawati bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi patokan yang menggambarkan sejauh mana populasi di suatu wilayah dapat melakukan akses manfaat dari pembangunan yaitu dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya.

Peningkatan suatu perekonomian dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kemajuan di sektor perekonomian suatu wilayah juga dapat memaksimalkan nilai IPM. Hal ini dikarenakan, pembangunan Sumber Daya Manusia juga bisa disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Peningkatan perekonomian di suatu wilayah akan meningkatkan besaran IPM.¹⁴

¹³ Aulia Nur Azizah and Binti Nur Asiyah, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2697–2718.

¹⁴ Jihan Aqilah Rosyadah, "Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)," *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics* 4, no. 1 (2021): 1080–1092.

Gambar 1. 5 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah (%) Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dilihat dari gambar 1.5 di atas bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang stabil, mencerminkan adanya perbaikan di berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Pada tahun 2019, nilai IPM berada di sekitar 71,73 dan terus mengalami kenaikan setiap tahun hingga mencapai sekitar 73,39 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah yang berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seperti memperluas akses ke pendidikan dasar dan menengah serta meningkatkan angka partisipasi sekolah. Di bidang kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan turut berkontribusi pada kenaikan angka harapan hidup dan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Dari sisi ekonomi, perbaikan standar hidup masyarakat terlihat dari menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya daya beli. Meski demikian, kenaikan IPM ini belum merata di seluruh wilayah Jawa Tengah, karena masih ada beberapa daerah yang

tertinggal, terutama di pedesaan dan wilayah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, meskipun tren peningkatan ini positif, masih diperlukan kebijakan yang lebih terfokus untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah agar pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat tercapai di seluruh Jawa Tengah.

Proses pembangunan yang saat ini sedang dijalankan di Indonesia, peningkatan pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi sasaran utama, hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi seringkali berkaitan dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat baik sebagai modal untuk menjalankan proses pembangunan. Negara Indonesia memiliki indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di lihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).¹⁵

Menurut BPS untuk menunjukkan bagaimana progres kemajuan suatu bangsa dalam usahanya membangun kualitas hidup manusia, diperlukan beberapa indikator, salah satunya ialah IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang sudah dirancang untuk mengukur tingkat kemajuan sosial ekonomi suatu wilayah atau negara. Dalam IPM sendiri terdapat beberapa indeks yang menjadi komponen utama diantaranya adalah indeks harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak, dimana apabila ketiga komponen tersebut telah terpenuhi maka masyarakat dapat digolongkan masyarakat sejahtera.¹⁶

¹⁵ Rosyadah, "Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)," Hlm. 50

¹⁶ Muhammad Handy Rakhmawan and Tony Seno Aji, "Pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran, Dan Perumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur," *journal of*

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023**"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di latar belakang penelitian mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut.:

1. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan di Jawa Tengah dapat memicu berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya angka kemiskinan.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Namun, meskipun PDRB di Jawa Tengah mengalami peningkatan, kemiskinan di Jawa Tengah tetap berada di atas angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,03 persen.
3. Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 hingga 2023, persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan yang stabil. Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi umumnya diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan karena mencerminkan masyarakat yang lebih sejahtera. Namun, dalam kenyataannya, meski IPM meningkat, kemiskinan di Jawa Tengah tetap tinggi berada di atas angka kemiskinan

nasional yang sebesar 9,03 persen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan menjadi rumusan masalah, yaitu :

1. Apakah Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah periode 2019-2023?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk meneliti pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023.
2. Untuk meneliti pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023.
3. Untuk meneliti pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023.
4. Untuk meneliti pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari dilakukanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis atau akademis sebagai sumber informasi tambahan dan membantu perkembangan keilmuan khususnya dalam bidang studi kajian ilmu ekonomi mengenai pengaruh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan.

2. Secara Praktis

a. Bagi pengambilan kebijakan

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat dijadikan sarana evaluasi dan memahami lebih jauh untuk mengambil kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan ini.

b. Bagi pihak akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepustakaan atau referensi dibidang keilmuan ekonomi syariah, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya guna menambahkan pengetahuan khususnya bagi pihak yang tertarik dengan masalah yang sama.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu:
 - a. Tiga variabel bebas meliputi : Jumlah Penduduk (X1), Produk Domestik Regional Bruto (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X3)
 - b. Variabel terikat, Y adalah Kemiskinan.
2. Keterbatasan Penelitian ini meliputi:
 - a. Penelitian ini terbatas pada variabel jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia yang hanya mampu menjelaskan sebesar 56,22% terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2023 dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.
 - b. Pada penelitian ini terbatas yang hanya membahas mengenai jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2023, karena data terbaru untuk variabel-variabel tersebut hingga saat ini belum

tersedia atau belum diperbarui.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Kemiskinan (Y)

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan ataupun non makan. Kemiskinan dapat diukur dengan menyamakan tingkatan mengkonsumsi seorang dengan garis kemiskinan ataupun jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi setiap orang perbulan. Sebaliknya penduduk miskin merupakan penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di dasar garis kemiskinan.¹⁷

b. Jumlah Penduduk (X1)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk merupakan semua masyarakat yang tinggal di wilayah geografis di Jawa Tengah, selama minimal 6 bulan dan atau mereka yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berusaha untuk menetap. Jumlah penduduk mulai dari tahun 2019-2023 yang digunakan sebagai data.¹⁸

c. Produk Domestik Regional Bruto (X2)

Badan Pusat Statistika mengartikan bahwa Produk Domestik

¹⁷ Hilmi et al., "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli.", Hlm. 20

¹⁸ Aulia Nur Azizah and Binti Nur Asiyah, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2697–2718.

Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa atau nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah.¹⁹

d. Indeks Pembangunan Manusia (X3)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan parameter untuk mengukur tiga aspek utama dalam pembangunan yaitu angka harapan hidup, pengetahuan, dan pendidikan serta standar hidup yang layak.²⁰

2. Definisi Operasional

a. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana manusia hidup di bawah garis kemiskinan atau ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa kebutuhan material maupun non material.²¹ Kemiskinan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan satuan ukuran persentase. Adapun rumus perhitungannya:

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah Total Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}} \times 100$$

b. Jumlah Penduduk (X1)

Jumlah penduduk adalah jumlah individu yang secara legal

¹⁹ Rapika Kesatriani Damanik and Selna Aprilia Sidauruk, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 3 (2020): 358–368.

²⁰ Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berbudaya Saing Tinggi*, (Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2009), Hlm. 28

²¹ Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan Dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia* (Jakarta: BPS, 2023). Hlm. 5-7

tercatat sebagai penduduk tetap dalam suatu wilayah administrasi dalam kurun waktu tertentu. Jumlah penduduk merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan satuan pengukuran jumlah jiwa (orang).

c. Produk Domestik Regional Bruto (X2)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah (nilai output-nilai input) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan satuan ukuran persentase diukur dengan rupiah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Adapun rumus perhitungannya:

$$\text{PDRB} = \frac{\text{PDRB Harga Berlaku}}{\text{Indeks Harga Konsumen (IHK)}} \times 100$$

d. Indeks Pembangunan Manusia (X3)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar yaitu kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan satuan pengukuran berupa skor indeks (0-100). Adapun cara perhitungannya adalah:²²

$$IPM = (I_{\text{Harapan Hidup}} \times I_{\text{Pendidikan}} \times I_{\text{Pengeluaran}})^{\frac{1}{3}}$$

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : a) Latar Belakang, b) Identifikasi Masalah, c) Rumusan Masalah, d) Tujuan Penelitian, e) Kegunaan Penelitian, f) Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, g) Penegasan Istilah, dan h) Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdiri dari teori-teori yang mendukung sesuai pembahasan dari variabel pertama sampai variabel seterusnya, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan di bahas yang berhubungan dengan metode penelitian, yaitu : a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, b) Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian, c) Sumber Data, Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran, d) Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, dan e) Teknik Analisis Data.

²² Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2022*, (Jakarta: BPS, 2022), hal. 10-15.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari : a) Profil Provinsi Jawa Tengah, b) Deskripsi Data Penelitian, dan c) Analisis Hasil Penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang telah diperoleh. Bab ini diajukan untuk menjawab masalah yang diteliti dan menjelaskan hal yang telah ditemukan dalam penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada akhir bab terdiri dari : a) Kesimpulan yaitu pernyataan dari hasil penelitian secara singkat dan tepat serta menunjukkan kebenaran dari hipotesis, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, dan b) Saran yang diungkapkan berdasarkan hasil penelitian.